

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A'an Efendi, dkk, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 9, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2005.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016.
- C.S.T. Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, Karya Unipres, Jakarta, 2003.
- Djoni Sumardi Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah*, UII Press Yogyakarta, 2

Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR dan RBG sebagai Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015.

Gunanegara, *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah, Sejarah Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia*, Tatanusa, Cet. Pertama, Jakarta, 2016.

H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2014.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Kurniawarman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Pers, Padang, 2006.

Lieke Lianadevi Tukgali, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kertasputih Communication, Jakarta, 2010.

Maria SW Sumardjono, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

-----, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Media Nusantara, Cet. Pertama, Jakarta, 2008.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mudakir Iskandar Syah, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata, Jakarta, 2007.

-----, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Aksara, Jakarta, 2015.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014.

Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cet.1, Kencana, Jakarta, 2016.

Mustofa dan Suratman, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

-----, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenamedia Group, Cet. 9, Jakarta, 2016.

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

-----, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed.1, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

-----, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Ed. 1, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

-----, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI-Press, Jakarta, 2015.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 14, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*, Cet.3, Kenca 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 -2032

Kamus-Kamus

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*, Angkasa, Bandung, 1996.

Website

Abi Asmana; <http://legalstudies71.blogspot.com/2017/10/teori-kehendak-wilstheorie.html?m=1>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 20.00 Wib.

Acamedia; https://www.academia.edu/19212952/Kata_problematika_berasal_dari_kata_probl em, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, pukul 22.00 Wib.

CNN Indonesia; <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190617201255-92-404045/pemerintah-pastikan-tol-padang-pekanbaru-tetap-dibangun>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 14.00 wib.

Langgam; <https://langgam.id/kabupaten-padang-pariaman-sumatra-barat/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 15.15 Wib.

Negara Hukum; <https://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 06.00 wib.

Wikipedia; https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_tol, diakses pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 14.00 Wib.

Wikipedia; https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Padang%E2%80%93Pekanbaru, diakses pada tanggal 16 Mei 2020, pukul 22.30 Wib.

Wikipedia; https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_tan_Padang_Pariaman diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 15.00 Wib.

Tesis, Disertasi

Aristya Windiana Pamuncak, *“Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012”*, Maret 2016, Jurnal Law and Justice Vol. 1 No. 1.

Hengki Andora, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.

Muhammad Fadli, *Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Diatas Tanah Bekas Hak Barat Di Sumatera Barat*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

Putri Nirwana, *Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Layang (Fly Over) Simpang Delapan Padang Panjang Sebagai Aset*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2013.

Poppy Yulianti, *Penggunaan Konsinyasi Untuk Penyelesaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

Risse Seprima, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ampar- Padang Birik-Birik Kota Pariaman*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014.

Yulizar Yakub, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Sumatera Barat*, (Ringkasan Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2017.

Jurnal

Bambang Sutiyo, “*Konsepsi HAM dan Implementasinya di Indonesia*”, dalam jurnal UNISIA No. 44/XXV/I/2002.

Muwahid, “*Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum Dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan*”, September 2015, AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2.

Sri Haryono dkk, “*Kedudukan Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Analisis Substansi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)*”, Januari-Juni 2016, Fakultas Hukum UNS, Jurnal Reperme III No. 1.

